



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
2. Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
3. Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI)
4. Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98)
5. Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi)
6. Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
7. Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
8. Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)
9. Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG)
10. Muhammad Abrar Ali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
11. Bintoro Suryo Sudibyo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
12. Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)

- 13.T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
14. Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
15. Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 7 Maret 2023, Pukul 13.15 – 13.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Abdul Hakim
2. Sofyan Bin Abd Latief

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ari Lazuardi
2. Endang Rokhani
3. Mustiyah
4. Saepul Anwar
5. Sahat Butar Butar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, Pemohon atau Kuasanya, kita mulai, ya.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini Pemohon Prinsipal ada yang hadir?

2. PEMOHON: ARI LAZUARDI [00:37]

Ada, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:38]

Ada. Siapa yang hadir? Pak Abdul Hakim? Pak Andi Wijaya, enggak ya?

4. PEMOHON: ARI LAZUARDI [00:44]

Abdul Hakim dan Pak Sofyan.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Pak Sofyan. Oke, di mana? Belakang itu?

6. PEMOHON: ARI LAZUARDI [00:51]

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Oke. Yang Kuasa Hukumnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pak Ari, kemudian Bu Endang, Bu Mustiyah, Pak Saepul Anwar.

8. PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:07]

Sama Pak Sahat Butar Butar.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Pak?

10. PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:11]

Sahat Butar Butar.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Sahat Butar Butar? Oh, di sini enggak ditulis kalau hadir. Itu tolong ditulis, ya. Pak Sahat Butar Butar hadir, ya.

Jadi, Kuasa Hukumnya yang hadir 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5, tolong itu dibetulkan di Risalahnya. Prinsipal 2 orang hadir, Kuasa Hukumnya 5 orang hadir. Yang tidak hadir, Kuasa Hukum Pak Abu Bakar, ya? Baik.

Perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah, kita bertiga sudah menerima pada hari Senin, 6 Maret 2023, pada pukul 10.49 WIB, betul ya, ini masuk ke sini? Betul?

12. PEMOHON: ARI LAZUARDI [02:06]

Betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Ya, dijawab! Betul, ya. Baik.

Pada kesempatan ini, kita sudah menerima tertulis. Sekarang silakan menyampaikan secara lisan permohonan ini di dalam persidangan yang terbuka untuk umum supaya diketahui oleh semua pihak. Tidak perlu dibacakan keseluruhan, tapi cukup dibaca pokok-pokoknya saja. Kemudian di bagian Petitum, tolong disampaikan atau dibacakan keseluruhan. Silakan!

14. PEMOHON: ARI LAZUARDI [02:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Walaikum salam.

16. PEMOHON: ARI LAZUARDI [02:53]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami, Pemohon 22 ... Pemohon Registrasi Perkara PUU Nomor 22 Tahun 2023 dengan ini menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim pemeriksa pendahulu, tanggal 9 Maret. Kami akan sampaikan pokok-pokok perubahan saja, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Ya, tidak perlu keseluruhan karena yang tertulis sudah lengkap di sini.

18. PEMOHON: ARI LAZUARDI [03:19]

Pertama mengenai Pemohon, sebelumnya ada saran dari Hakim Yang Mulia untuk mengualifikasikan Pemohon sebagai perwakilan lembaganya. Dengan ini, kami ubah jadinya tadinya ada 15 Pemohon, menjadi 10 Pemohon karena dalam beberapa Pemohon itu dalam konteks pengujian perppu ini dia diwakili oleh dua orang sekaligus atau juga ada hanya 1 orang sekaligus.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

Oke, jadi Para Pemohon terdiri dari 10 Pemohon, ya?

20. PEMOHON: ARI LAZUARDI [03:52]

10 Pemohon. Sebagai contoh misalkan untuk Pemohon I dari SPSI, R. Abdullah dan Afif Johan sebagai Pemohon I.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Ya.

22. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:00]

Itu perubahan pertama mengenai jumlah Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Ya. yang selebihnya dianggap dibacakan, ya.

24. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:07]

Selebihnya kami anggap dibacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Ya.

26. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:09]

Lalu mengenai uraian di bab ... di I mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, relatif kami tidak banyak mengubah, hanya kami adopsi saran dari Hakim Yang Mulia mengenai hierarkis (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Dilengkapi secara hierarkis, ya?

28. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:24]

Hierarkisnya, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Baik.

30. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:25]

Jadi, dianggap dibacakan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Ya.

32. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:27]

Lalu, mengenai Bab II (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Karena ini pengujian formil, maka ada tenggat waktu pengujian formil, ya?

34. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:33]

Ya, tenggat waktu juga kami tegaskan kembali dari saran Hakim Yang Mulia Daniel Yusmic. Bahwasanya berapa hari setelah diajukan? Kami tegaskan di sini 41 hari sejak tanggal diundangkan (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Pada poin 3 itu, ya?

36. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:48]

Di angka 3.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Baik.

38. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:49]

Lalu, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, itu kami juga ada perubahan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55]

Ya.

40. PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:56]

Khususnya bagian-bagian yang perlu kami tekankan, tapi sebelum masuk ke sana menjawab apa yang saran dari Yang Mulia, misalkan Pemohon dari ... apakah Pemohon itu cukup diwakili oleh ketua umum saja atau oleh sekretaris jenderal nya (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]

Itu disesuaikan dengan AD/ART nya.

42. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:16]

Ya. sesuaikan dengan AD/ART. Sebagai contoh misalkan kami juga tegaskan dalam bukti tambahan, kemarin kami masukkan. Ada surat mandat dari masing-masing organisasinya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:27]

Oke.

44. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:27]

Khusus misalkan untuk Pemohon dari Persatuan Pegawai Indonesia Power, misalkan mengapa hanya Ketua dan Sekretaris I? Itu sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangganya (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Ya.

46. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:34]

Sebagaimana dimaksud dalam angka 22, halaman 17, perbaikan permohonan kami, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Ya. semuanya disesuaikan dengan AD/ART-nya, ya?

48. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:40]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Baik.

50. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:41]

Lalu kami lanjut saja (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:45]

Posita?

52. PEMOHON: ARI LAZUARDI [05:45]

Penegasan contoh legal standing sebagai serikat pekerja sebagai kelompok perseorangan, kami contohkan beberapa putusan MK yang memang mengadopsi dimana sebagian besar juga kami sebagai Kuasa dan para pihak juga sebagai Pemohon juga (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Itu di halaman (...)

54. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:02]

Itu di angka 45 sebagai contoh, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:04]

Halaman 22 sampai seterusnya itu, ya?

56. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:06]

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Baik.

58. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:08]

Itu kira-kira mengenai kedudukan hukum. Lalu, mengenai alasan permohonan pengujian. Ini kami hanya mengubah bagian-bagian tertentu, misalkan mengenai subbab yang tadinya alasan permohonan itu (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Tidak ada angka Romawi, jadi sekarang IV?

60. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:23]

Tidak ada angka, ya. Ada empat.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:25]

Itu sudah direnvoi, ya?

62. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:26]

Sudah direnvoi kemarin, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:28]

Baik.

64. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:29]

Kami tegaskan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, di IVA, mengenai tidak terpenuhinya parameter kegentingan memaksa (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Ya.

66. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:36]

Sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 1945 (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]

Ya, itu halaman 29.

68. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:40]

Halaman 29, itu kami uraikan mengenai pembagian penjelasan kegentingan memaksa dengan Undang-Undang Cipta kerja. Lalu di subnya kami tegaskan tidak ada kebutuhan mendesak, di halaman 34, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]

Ya.

70. PEMOHON: ARI LAZUARDI [06:57]

Dan kami tegaskan dari uraian itu juga di ... tidak adanya kekosongan hukum.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:02]

Ya.

72. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:02]

Di halaman 37 dan kami tegaskan juga tenggang waktu 2 tahun itu berdasarkan Putusan Nomor 91/2021, seharusnya dimanfaatkan untuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang Undang-Undang Cipta kerja.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Ya.

74. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:18]

Ini 3 uraian yang kami jabarkan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan Putusan 38/2009 mengenai parameter (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Itu angka-angka babnya direnvoi, ya.

76. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:27]

Ya, setiap babnya kami renvoi yang harusnya IV, tetapi tertulis III. Jadi, kami renvoi semua IV.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:34]

Terus kemudian yang (...)

78. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:35]

Lalu di IVB, kami tegaskan mengenai Perppu Cipta Kerja itu merupakan bentuk (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:40]

Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah 91 (...)

80. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:44]

Ya, kami tetap tegaskan itu bagian dari redaksi, diksi yang kami pilih pembangkangan konstitusi.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:48]

Ya.

82. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:48]

Karena itu salah satunya kami kutip dari salah satu Hakim Yang Mulia menyatakan mengenai ketidaktaatan Putusan MK itu merupakan suatu bentuk pembangkangan Konstitusi.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Oke.

84. PEMOHON: ARI LAZUARDI [07:57]

Itu diuraikan di angka 41, halaman 43.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Oke.

86. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:00]

Selebihnya, kami akan sampaikan petitum, Yang Mulia?

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Ya.

88. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:06]

Petitumnya kami bacakan secara utuh, izin.

89. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:07]

Ya, silakan seluruhnya!

90. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:08]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002[*sic!*] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Oke.

92. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:46]

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ... maka Para Pemohon memohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:53]

Ini ditandatangani oleh semua Kuasa Hukum?

94. PEMOHON: ARI LAZUARDI [08:54]

Ditandatangani oleh seluruh penerima Kuasa. Demikian, Yang Mulia, perbaiki permohonan kami.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Terima kasih. Jadi, sudah diterima Majelis Panel, baik permohonan secara ter ... perbaikan secara tertulis maupun secara lisan. Yang belum dibacakan dianggap telah dibacakan seluruhnya, ya. Baik.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada? Cukup, ya?

Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic? Cukup?

Kalau begitu, ini sudah cukup. Ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon atau Kuasanya?

96. PEMOHON: ARI LAZUARDI [09:26]

Ada, paling kami perlu penegasan mengenai bukti yang telah kami sampaikan dari bukti P-1 sampai P-54.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Ya.

98. PEMOHON: ARI LAZUARDI [09:35]

Itu terakhir kami sampaikan kemarin tanggal 6 Maret. Bukti awal ... bukti pertama yang kami daftarkan itu, kami ada perubahan redaksional. Jadi, bukti terakhir yang tanggal 6 Maret kami submit merupakan daftar bukti yang paling terakhir, mohon disahkan oleh Majelis Hakim.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]

Baik. Jadi, Kepaniteraan telah menerima dan kemudian telah diverifikasi bukti P-1 sampai dengan P-54, betul ya? Baik, kalau begitu bukti P-1 sampai dengan P-54 disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

100. PEMOHON: ARI LAZUARDI [10:12]

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:13]

Baik, cukup. Terima kasih atas permohonannya kepada Prinsipal yang hadir, Pak Abdul Hakim dan Pak Andi Wija ... Pak Sofyan. Kepada Kuasa Hukumnya, 5 orang yang telah hadir, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang akan disampaikan, maka persidangan penerimaan perbaikan permohonan pada siang hari ini telah selesai.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 7 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

